



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
SEKRETARIAT KABINET**

**SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2023**



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
SEKRETARIAT KABINET**

**SEKRETARIAT KABINET
2023**



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

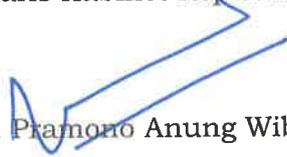
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir.  Pramono Anung Wibowo, M.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KABINET**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	96 Persen
		Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	96 Persen
3	Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93 Persen
		Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100 Persen
4	Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga (Instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	96 Persen
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90 Persen
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Indeks Reformasi Birokrasi	A (83,36)
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp44.062.850.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp308.229.378.000,-
Total Anggaran	Rp352.292.228.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Wakil Sekretaris Kabinet

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023

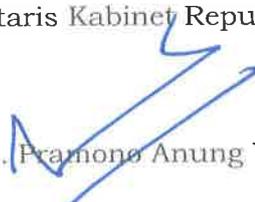
Pihak Pertama,
Wakil Sekretaris Kabinet

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
WAKIL SEKRETARIS KABINET**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti	100 Persen
		Persentase Arahan Wakil Sekretaris Kabinet pada Surat atas Pelaksanaan Tugas Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti	100 Persen
		Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait Masalah-masalah Strategis Berdasarkan Penugasan dan Arahan Sekretaris Kabinet dan/atau Inisiatif Wakil Sekretaris Kabinet yang dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase Arahan Wakil Sekretaris Kabinet pada Memorandum atas Pelaksanaan Tugas Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti	100 Persen

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir.  Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Wakil Sekretaris Kabinet


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.



**KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN**





**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Deputy Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan pogram pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	96 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	A(87,40)
		Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hasil reviu Inspektorat	33,97
		Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	90 Persen

Kegiatan

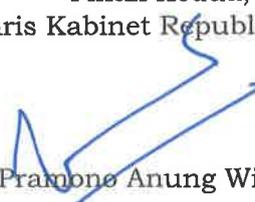
Anggaran

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

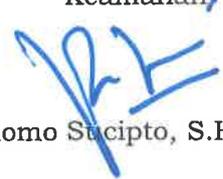
Rp2.727.089.000,-

2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp1.672.911.000,-
3.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp200.000.000,-
	Total Anggaran	Rp4.600.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,


Purnomo Sutripto, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri

Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/kepala lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas kebijakan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

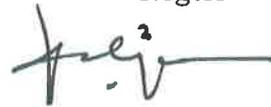
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Rp553.696.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Rp546.304.000,-
Total Anggaran	Rp1.100.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,



Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri



Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Poerwono, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara

Bambang Poerwono, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/kepala lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp625.983.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp374.017.000,-
Total Anggaran	Rp1.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,



Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara



Bambang Poerwono, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional

Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional	Rp711.580.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	Rp288.420.000,-
Total Anggaran	Rp1.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,



Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional



Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

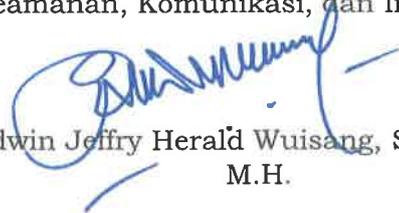
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,


Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika


Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	B (5-8 kali revisi)
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Rp835.830.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di
1. bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Rp464.170.000,-

Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerimaan

- Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan
1. penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan

Rp116.820.000,-

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- | | |
|--|--------------------------|
| 2. Perencanaan program dan anggaran Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Rp45.485.000,- |
| 3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Rp37.695.000,- |
| Total Anggaran | Rp1.500.000.000,- |

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,


Purnomo Supripto, S.H., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika


Edwin Jeffrey-Herald Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.



**KEDEPUTIAN BIDANG
PEREKONOMIAN**





**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	96 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Perekonomian	A (87,40)
		Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Perekonomian hasil reuiu Inspektorat	36,17
		Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Perekonomian	90 Persen

	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	Rp1.543.226.000,-
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	Rp2.956.774.000,-
3.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp200.000.000,-
	Total Anggaran	Rp4.700.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan, dan
Pengembangan Iklim Usaha

Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN
PENGEMBANGAN IKLIM USAHA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian

- Rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro,
1. Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha

Rp219.174.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian

- Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di
1. bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha

Rp780.826.000,-

Total Anggaran

Rp1.000.000.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

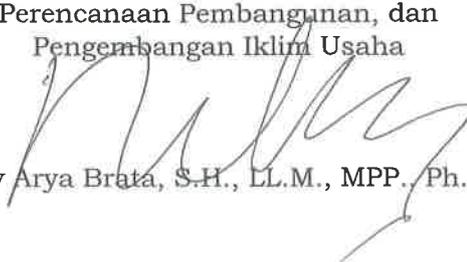
Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan, dan
Pengembangan Iklim Usaha

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.



Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Kurniawan, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Agus Kurniawan, S.H., LL.M.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN
KETENAGAKERJAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang di setujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Perdagangan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	90 Persen

Kegiatan**Anggaran**

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian

1. Rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Rp452.488.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian

1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Rp747.512.000,-

Total Anggaran

Rp1.200.000.000,-

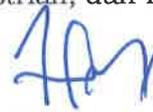
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan



Agus Kurniawan, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha
dan Wilayah

Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	90 Persen

Kegiatan**Anggaran****Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian**

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah | Rp118.674.000,- |
|---|-----------------|

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah | Rp881.326.000,- |
|---|-----------------|

Total Anggaran	Rp1.000.000.000,-
----------------	-------------------

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang PerekonomianPihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan
Pangan, dan Inovasi

Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN INOVASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	70 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	B (5-8 kali revisi)
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	Rp752.890.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	Rp547.110.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Pernerjemah	
1. Perencanaan program dan anggaran Kedeputan Bidang Perekonomian	Rp45.164.000,-
2. Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan	Rp91.776.000,-

Kedeputian Bidang Perekonomian

3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi
birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian Rp63.060.000,-
- Total Anggaran Rp1.500.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan
Pangan, dan Inovasi



Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.



**KEDEPUTIAN BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN**





**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan


Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	96 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	A (87,40)
		Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hasil reviu Inspektorat	34,98
		Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	90 Persen

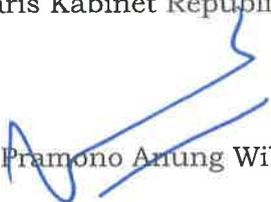
Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Rp2.525.319.000,- |
| 2. | Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Rp1.774.681.000,- |

3.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp200.000.000,-
	Total Anggaran	Rp4.500.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir.  Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,
Pemuda, dan Olahraga

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	C (9-12 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet | Rp23.858.000,- |
| 2. | Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah | Rp540.810.000,- |

3.	Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	Rp84.058.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		
1.	Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Rp351.274.000,-
	Total Anggaran	Rp1.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga


Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	C (9-12 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet

Rp50.841.000,-

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 2. | Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah | Rp637.592.000,- |
| 3. | Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga | Rp53.497.000,- |

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan | Rp358.070.000,- |
| | Total Anggaran | Rp1.100.000.000,- |

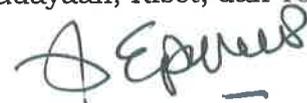
Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	C (9-12 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet	Rp99.873.000,-
2. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah	Rp455.638.000,-
3. Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	Rp69.152.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Rp375.337.000,-
Total Anggaran	Rp1.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak



Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asri Ernawati, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Asri Ernawati, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	C (9-12 Kali Revisi)
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	C (9-12 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet Rp83.886.000,-
2. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah Rp323.243.000,-
3. Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga Rp102.871.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan Rp690.000.000,-

Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah

1.	Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp31.956.000,-
2.	Perencanaan program dan anggaran bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp28.218.000,-
3.	Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan	Rp139.826.000,-
	Total Anggaran	Rp1.400.000.000,-

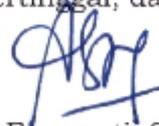
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.



Asri Ernawati, S.H., M.H.



**KEDEPUTIAN BIDANG
KEMARITIMAN DAN
INVESTASI**





**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.
Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

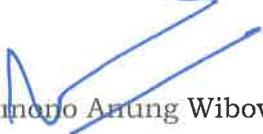
Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

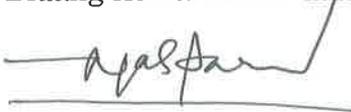
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	96 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Hasil penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	A (87,40)
		Indeks komponen pengungkit Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi hasil revidu Inspektorat	34,93
		Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	90 Persen

	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp2.792.719.000,-
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp1.607.281.000,-
3.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp200.000.000,-
	Total Anggaran	Rp4.600.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


Dr. Ir. Pramojo Antung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi


Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Irawati, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan,
dan Kehutanan

Diana Irawati, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi

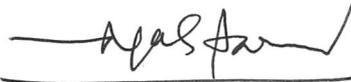
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Rp588.434.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
di bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	Rp411.566.000,-
Total Anggaran	Rp1.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi



Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan,
dan Kehutanan



Diana Irawati, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral
dan Lingkungan Hidup

Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi

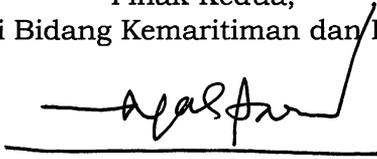
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Rp688.357.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
di bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp311.643.000,-
Total Anggaran	Rp1.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi



Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral
dan Lingkungan Hidup



Troeno Marayoga, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hennie Ambar Susilowati, S.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan
Pekerjaan Umum

Hennie Ambar Susilowati, S.H.

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Rp684.346.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi

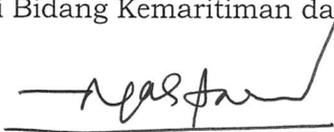
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di
bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Rp315.654.000,-

Total Anggaran

Rp1.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi



Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan
Pekerjaan Umum



Hennie Ambar Susilowati, S.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal
dan Kepariwisataaan

Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KEPARIWISATAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	70 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	B (5-8 kali revisi)
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

Rp831.582.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

Rp568.418.000,-

Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah

1. Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi

Rp22.350.000,-

2. Perencanaan program dan anggaran bidang Bidang Kemaritiman dan Investasi

Rp93.099.000,-

3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Investasi

Rp84.551.000,-

Total Anggaran

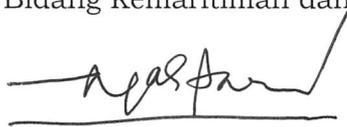
Rp1.600.000.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi



Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.



Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.



**KEDEPUTIAN BIDANG
DUKUNGAN KERJA KABINET**





**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

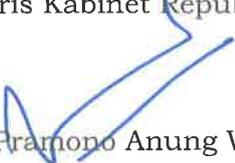
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet


Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.


Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93 Persen
		Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93 Persen
		Persentase naskah kepresidenan yang disetujui Presiden RI	100 Persen
		Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari stakeholder	100 Persen
2	Meningkatnya kualitas layanan kehumasan, informasi kegiatan kabinet dan keprotokolan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial	93 Persen
		Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan	93 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Hasil Penilaian SAKIP Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	A (87,40)
		Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet setelah reviu Inspektorat	35,21
		Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
1. Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan	Rp1.100.000.000,-
2. Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp6.800.000.000,-
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Keprotokolan	Rp2.900.000.000,-
4. Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp215.000.000,-
Total Anggaran	Rp11.015.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan
Persidangan

Dr. Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,
LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya sidang kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	93 Persen
		Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet	93 Persen
		Persentase layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya sesuai ketentuan	100 Persen
2	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

- Layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya

Rp4.600.000.000,-

Total Anggaran

Rp4.600.000.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang ~~Dukungan~~ Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan
Persidangan



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.



Dr. Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,
LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Priyantono, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pelaporan
Persidangan

Heru Priyantono, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PELAPORAN PERSIDANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan hasil sidang	Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap dokumen hasil-hasil sidang kabinet	93 Persen
		Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan permohonan salinan risalah sidang kabinet.	93 Persen
		Persentase dokumen Arahan Presiden (APRES) pada sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I di Sekretariat Kabinet sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase dokumen hasil sidang yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden yang sesuai ketentuan	100 Persen
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	70 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	B (5-8 kali revisi)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Layanan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya | Rp2.200.000.000,- |
|----|--|-------------------|

Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah

- | | | |
|---|--|----------------|
| Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan | | |
| 1. | penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputusan Bidang Dukungan Kerja Kabinet | Rp73.324.000,- |
| 2. | Perencanaan program dan anggaran Kedeputusan Bidang Dukungan Kerja Kabinet | Rp65.445.000,- |
| 3. | Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputusan Bidang Dukungan Kerja Kabinet | Rp76.231.000,- |

Total Anggaran	Rp2.415.000.000,-
----------------	-------------------

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pelaporan
Persidangan




Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Heru Priyantono, S.H., M.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Said Muhidin, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokol

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Said Muhidin, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kehumasan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kehumasan	93 Nilai IKM
		Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)	81 Nilai Indeks
2	Tersedianya Informasi Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Tepat Waktu dan Mutakhir	Persentase Informasi Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Tepat Waktu dan Mutakhir	100 Persen
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keprotokolan	93 Nilai IKM
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Asdep Humas dan Protokol	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Internal Asdep Humas dan Protokol	93 Nilai IKM
5	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Humas dan Protokol yang Efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Humas dan Protokol	B (5-8 kali revisi)
		Persentase Penyerapan Anggaran pada Asisten Deputi Bidang Humas dan Protokol	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Keprotokolan

1. Layanan Hubungan Masyarakat
2. Layanan Protokoler

Rp1.917.021.000,-

Rp982.979.000,-

Total Anggaran

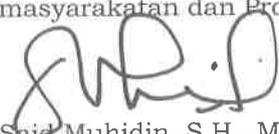
Rp2.900.000.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokol


Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.


Said Muhidin, S.H., M.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuyu Mulyani, S.IP., M.A.
Jabatan : Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Naskah dan
Penerjemahan

Yuyu Mulyani, S.IP., M.A.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN PENERJEMAHAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang Berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang Disampaikan secara Tepat Waktu	100 Persen
		Persentase Naskah Kepresidenan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase Naskah Kepresidenan yang Disusun sesuai Ketentuan	100 Persen
2	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Dokumen Terjemahan yang Dipublikasikan di Website Resmi Sekretariat Kabinet	100 Persen
		Persentase Pelayanan Penerjemahan yang Sesuai Ketentuan	100 Persen
3	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang Efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan

1. Naskah kepresidenan

Rp730.000.000,-

2. Dokumen terjemahan

Rp370.000.000,-

Total Anggaran

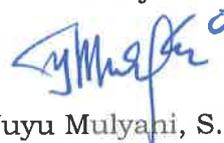
Rp1.100.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Naskah dan
Penerjemahan



Yuyu Mulyani, S.I.P., M.A.



**KEDEPUTIAN BIDANG
ADMINISTRASI**





**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

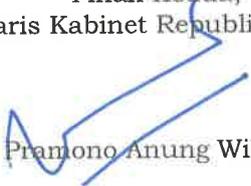
Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

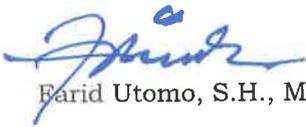
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir.  Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Administrasi


Farid Utomo, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang disetujui Presiden	90 Persen
		Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara akurat	99 Persen
2	Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet	Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet	83 Persen
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet	WTP
		Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet	BB (77,5)
		Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet	A (83,36)
		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet	86,50
		Nilai hasil monev keterbukaan informasi publik	Informatif (91)
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Administrasi	Hasil penilaian SAKIP Deputi Bidang Administrasi	A (81)
		Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Administrasi setelah hasil revidu Inspektorat	35,12
		Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Administrasi	90 Persen

	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir	Rp1.851.201.000,-
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Rp205.400.115.000,-
3.	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan	Rp1.900.000.000,-
4.	Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Pelayanan Umum	Rp67.614.455.000,-
5.	Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan	Rp1.100.000.000,-
	Total Anggaran	Rp277.865.771.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djaka Warsijanto, S.Sos., M.Ak.
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi


Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan


Djaka Warsijanto, S.Sos., M.Ak.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	79 Persen
2	Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 persen
		Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat	97 Persen
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Persen
3	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	80 Persen
		Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	80 Persen
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	B (5-8 Kali)
		Persentase penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Penyusunan Rencana Kerja Setkab | Rp287.916.000,- |
| 2. Revisi Anggaran | Rp320.195.000,- |
| 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Anggaran | Rp205.750.000,- |
| 4. Evaluasi Rencana Strategis Sekretariat Kabinet | Rp174.055.000,- |
| 5. Penyusunan Laporan Keuangan | Rp302.732.000,- |
| 6. Pengelolaan Perbendaharaan | Rp297.268.000,- |
| 7. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Kabinet | Rp312.084.000,- |

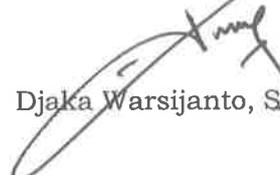
Total Anggaran

Rp1.900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan


Farid Utomo, S.H., M.H.


Djaka Warsijanto, S.Sos., M.Ak.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Henny Navilah, S.H., LL.M.

Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.

Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi


Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana


Henny Navilah, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	90 Persen
2	Meningkatnya kualitas layanan manajemen sumber daya manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	80 Persen
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	85 Persen
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	85 Persen
		Indeks Sistem Merit	300 (Sangat Baik)
3	Meningkatnya efektivitas layanan manajemen organisasi dan tata laksana	Nilai Evaluasi Kelembagaan	80 Persen
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80 Persen
		Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu	80 Persen
		Persentase kepuasan terhadap layanan bantuan hukum	75 Persen
4	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	C (9-12 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir

1. Penyiapan Sidang Tim Penilai Akhir

Rp288.137.000,-

2. Pelaksanaan Sidang Tim Penilai Akhir	Rp1.359.864.000,-
3. Penyusunan Rancangan Keputusan Presiden	Rp169.000.000,-
4. Persetujuan Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Negara	Rp34.200.000,-
Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	
1. Gaji dan Tunjangan	Rp196.753.839.000,-
2. Rekrutmen dan pengangkatan pegawai	Rp512.350.000,-
3. Pembinaan kepegawaian	Rp706.958.000,-
4. Promosi, mutasi dan rotasi, serta kenaikan pangkat Pegawai	Rp1.218.736.000,-
5. Pengembangan kepegawaian	Rp5.490.403.000,-
6. Pemberhentian pegawai	Rp14.084.000,-
7. Pembentukan Peraturan Internal	Rp356.728.000,-
8. Perjanjian Kerjasama/MoU	Rp13.500.000,-
9. Pengelolaan kelembagaan	Rp195.973.000,-
10. Evaluasi ketatalaksanaan SOP, Standar Pelayanan dan proses bisnis	Rp117.844.000,-
11. Pelaksanaan bantuan hukum	Rp19.700.000,-
Total Anggaran	Rp207.251.316.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi


Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana


Henny Navilah, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.
Jabatan : Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Administrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan
Reformasi Birokrasi



Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Jumlah unit ke deputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori A	5 Unit Kerja
		Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja	82 Persen
		Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat	6 Komponen
		Persentase tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi	82 Persen
2	Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan	82 Persen
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan SAKIP dan RB Kedeputian Bidang Administrasi	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Administrasi	80 Persen
		Persentase pemenuhan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi Bidang Administrasi	80 Persen
4	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	B (5-8 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp231.147.000,- |
| 2. Pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja | Rp102.025.000,- |
| 3. Pengembangan sistem manajemen kinerja | Rp33.828.000,- |
| 4. Perencanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet | Rp58.800.000,- |
| 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet | Rp242.244.000,- |

7.	Pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp52.456.000,-
8.	Dukungan pelayanan dan administrasi ketatausahaan dan persuratan	Rp366.000.000,-
	Total Anggaran	Rp1.100.000.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi



Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmat Imam Assari, S.Kom., M.AP.

Jabatan : Plt. Kepala Biro Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Administrasi

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Biro Umum

Farid Utomo, S.H., M.H.

Rachmat Imam Assari, S.Kom., M.AP.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO UMUM**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengadaan, Barang Milik Negara, Pemeliharaan, Perlengkapan dan Jamuan, serta Pelayanan Umum Lainnya di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase kepuasan terhadap layanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet	90 Persen
		Indeks Pengelolaan Aset	3.24
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	60
2	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Umum yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Umum	C (9-12 kali revisi)
		Persentase Penyerapan Anggaran pada Biro Umum	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Pelayanan Umum

1. Layanan BMN	Rp1.702.286.000,-
2. Layanan Umum	Rp1.642.498.000,-
3. Layanan Perkantoran	Rp62.149.971.000,-
4. Layanan Sarana Internal	Rp1.919.700.000,-
5. Layanan Prasarana Internal	Rp200.000.000,-
Total Anggaran	Rp67.614.455.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Biro Umum


 Farid Utomo, S.H., M.H.


 Rachmat Imam Assari, S.Kom., M.AP.



STAF AHLI





**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.

Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Politik dan Hukum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

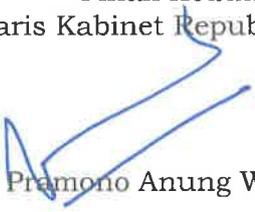
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Politik
dan Hukum


Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.


Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN HUKUM**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum yang efektif	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan

1. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu strategis di bidang Politik dan Hukum

Rp300.000.000,-

Total Anggaran

Rp300.000.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Politik dan Hukum

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mailani Amperawan, S.E., M.Si.

Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.


Mailani Amperawan, S.E., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang efektif	B (5-8 kali revisi)
		Persentase Penyerapan Anggaran pada Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan	
Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan	
1. terkait isu strategis di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat	Rp300.000.000,-
Total Anggaran	Rp300.000.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
 Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
 Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Mailani Amperawan, S.E., M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.
Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan
Internasional

Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STAF AHLI BIDANG KEMARITIMAN, INVESTASI, DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan

- | | |
|---|-----------------|
| Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan | |
| 1. terkait isu strategis di bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional | Rp300.000.000,- |
| Total Anggaran | Rp300.000.000,- |

Pihak Kedua,
 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
 Pihak Pertama,
 Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
 Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan
 Internasional

Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Reformasi Birokrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Reformasi Birokrasi


Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.


Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STAF AHLI BIDANG REFORMASI BIROKRASI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi yang efektif	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan

1. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu strategis di bidang Reformasi Birokrasi

Rp300.000.000,-

Total Anggaran

Rp300.000.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Reformasi Birokrasi

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.



INSPEKTORAT





**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.
Jabatan : Plt. Inspektur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Plt. Inspektur

Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80 Persen
		Jumlah unit ke deputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	6 Unit
		Penyampaian Laporan Hasil PMPRB Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	1 Laporan
		Indeks Kapabilitas APIP	Level 3
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80 Persen
		Deviasi antara nilai PMPRB hasil Tim Penilai Internal (TPI) dengan hasil evaluasi KemenPANRB	<=5
		Persentase rencana aksi bidang penguatan pengawasan yang mencapai target	85 Persen
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat	70 Persen
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,3
2	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat yang efektif	Indeks revisi program anggaran Inspektorat	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Inspektorat	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
1. Layanan Umum	Rp12.626.000,-
2. Layanan Audit Internal	Rp987.374.000,-
Total Anggaran	Rp1.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Plt. Inspektur

Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.



PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eny Nur'aini, S.AP., M.A.
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi

Eny Nur'aini, S.AP., M.A.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi publik dan e-government	Nilai hasil monev keterbukaan informasi publik	91
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.40
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Nilai hasil pengawasan kearsipan	63
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan	Persentase kepuasan pengguna layanan Perpustakaan Khusus Sekretariat Kabinet	80.15 persen
4	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi	Persentase kepuasan terhadap layanan teknologi informasi	78.5 persen
5	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi	B (5 - 8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Pusat Data dan Teknologi Informasi	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Data, Teknologi Informasi, Kearsipan, dan Perpustakaan

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp351.385.000,-
2. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp6.397.140.000,-
3. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp3.938.629.000,-
4. Sistem Informasi Pemerintahan	Rp9.935.212.000,-
5. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp405.539.000,-
Total Anggaran	Rp21.027.905.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Prambono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi

Eny Nur'aini, S.AP., M.A.



**PUSAT PEMBINAAN
PENERJEMAH**





**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyu Utami, S.IP., M.E.
Jabatan : Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

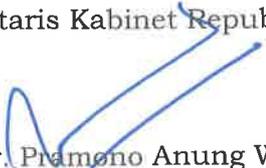
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah

Dr. Ir.  Pramono Anung Wibowo, M.M.


Sri Wahyu Utami, S.IP., M.E.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Persentase tingkat kepuasan layanan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah	90 Persen
2	Tersedianya Pejabat Fungsional Penerjemah yang berkualitas	Persentase kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang mengikuti uji kompetensi	50 Persen
		Jumlah keikutsertaan Pejabat Fungsional Penerjemah dalam kegiatan nasional atau internasional	5 PFP
3	Terwujudnya rekomendasi pembinaan Pejabat Fungsional Penerjemah yang berkualitas	Persentase rekomendasi penilaian Pejabat Fungsional Penerjemah yang diselesaikan secara akurat	100 Persen
		Persentase rekomendasi terkait penilaian, akreditasi, penetapan angka kredit, pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan, dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan yang diselesaikan secara tepat waktu	100 Persen
		Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan pelayanan Jabatan Fungsional Penerjemah yang ditindaklanjuti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB)	100 Persen
4	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan penerjemahan yang berkualitas	Persentase kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah pada pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	100 Persen
		Tingkat Kepuasan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah	90 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Pembinaan Penerjemah	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang disampaikan secara tepat waktu	100 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Pusat Pembinaan Penerjemah	75 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran yang disampaikan secara tepat waktu	100 Persen
		Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem e-JFP dan Media Sosial	75 Persen
6	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Pusat Pembinaan Penerjemah yang Efektif	Indeks revisi program dan anggaran Pusat Pembinaan Penerjemah	C (10 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Pusat Pembinaan Penerjemah	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Penilaian kinerja JFP | Rp736.178.000,- |
| 2. Penerbitan Jurnal Penerjemah | Rp214.500.000,- |
| 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan JFP | Rp60.268.000,- |
| 4. Penyusunan Grand design sertifikasi kepakaran Jabatan Fungsional penerjemah | Rp899.959.000,- |
| 5. Perencanaan dan pengembangan program pembinaan JFP | Rp271.767.000,- |
| 6. Penyusunan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah | Rp35.250.000,- |
| 7. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah | Rp321.688.000,- |
| 8. Kerja sama pengembangan kapasitas jabatan fungsional penerjemah | Rp604.019.000,- |
| 9. Persiapan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah | Rp6.750.000,- |
| 10. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah | Rp61.270.000,- |

Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah

- | | |
|---|----------------|
| Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan | |
| 1. penatausahaan, teknis, dan administrasi Pusat Pembinaan Penerjemah | Rp77.271.000,- |

2. Pengelolaan sistem informasi jabatan fungsional penerjemah	Rp75.436.000,-
3. Perencanaan program dan anggaran pembinaan JFP	Rp36.680.000,-
4. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp37.516.000,-
Total Anggaran	Rp3.438.552.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah


Sri Wahyu Utami, S.IP., M.E.



**SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2023**